

Jakarta, 19 November 2024

No. : 05/PN/PEMANTAUPILKADAPAPUA/XI/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Narasumber

Kepada YTH,
**Dr. Antyo Pracoyo, M.Si Akademisi Ekonomi Perbankan Indonesia Banking School/Dosen
Keuangan Negara Universitas Trisakti**

Di

Papua

Dengan Hormat,

Lokataru Foundation sebagai organisasi nirlaba yang berpusat di Jakarta, Indonesia, didirikan pada Mei 2017 atas prakarsya beberapa aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi yang memiliki rekam jejak dan rekam prestasi dalam bidang pembangunan HAM, demokrasi, dan lingkungan di Indonesia. Lokataru Foundation, dalam kerja-kerja organisasinya bukan saja fokus pada isu-isu nasional, melainkan berkonsentrasi secara maksimal dalam mengadvokasi dan melakukan *monitoring* proyek-proyek di daerah terutama di wilayah Timur Indonesia seperti Zona Sulawesi, Zona Maluku, Zona Bali Nusra, dan Zona Papua.

Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 ini, Lokataru Foundation memfokuskan diri pada isu pemilihan kepala daerah dengan mendaftar sebagai lembaga pemantau resmi yang terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Jakarta, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Hal tersebut menjadi basis utama daerah pemantaun Pilkada yang dilakukan oleh Lokataru Foundation.

Dengan demikian, Lokataru Foundation bermaksud mengundang Bapak/Ibu agar kiranya dapat menjadi Narasumber pada diskusi pemantaun Pilkada dengan judul **"ISU PUBLIK DI PILKADA PAPUA 2024: Perspektif Desentralisasi Fiskal, Lingkungan, IPM, Korupsi Ekonomi Politik, dan HAM.** Untuk informasi lebih lanjut, **Terlampir TOR** kegiatan.

Term of References

**MEMANTAU ISU PUBLIK DI PILKADA PAPUA 2024:
Perspektif Desentralisasi Fiskal, Lingkungan, IPM, Korupsi Ekopol, & HAM**

DASAR PEMIKIRAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 merupakan momentum penting dalam perjalanan konsolidasi demokrasi lokal guna melahirkan pemimpin publik yang dapat mendekatkan warga pada kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan. Pilkada pada dasarnya wujud kedaulatan rakyat dan proses yang membebaskan warga dari belenggu ketidakberdayaan secara ekonomi dan politik. Pun demikian, harapan besar warga di Tanah Papua menjelang Pilkada pada 27 November 2024 mendatang yakni suksesi kepemimpinan politik yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah baik aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan seterusnya.

Alih-alih membicarakan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan, Pilkada di Tanah Papua berdasarkan hasil pemantauan Lokataru Foundation sejak 22 September pada tahapan penetapan pasangan calon hingga 19 November di tahapan kampanye dan debat publik peserta pemilu, di mana sejumlah isu publik luput didiskusikan secara substantif dan mendalam guna mencari formulasi pendekatan kebijakan yang tepat. Menjawab keringnya diskursus substantif tersebut, maka Lokataru Foundation sebagai kelompok masyarakat sipil yang berbasis pada kerja-kerja riset, advokasi, dan pemberdayaan bermaksud untuk mendorong Pilkada di Tanah Papua tahun 2024 ini untuk mendiskusikan secara mendalam berbagai isu publik yang krusial, baik dalam konteks pembangunan daerah maupun kepentingan masyarakat. Beberapa isu publik yang patut didorong oleh publik secara luas agar menjadi fokus utama Pilkada di Tanah Papua, yakni sebagai berikut:

- **Lingkungan**

Tanah Papua, dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi tantangan besar terkait pelestarian lingkungan. Isu lingkungan seringkali terabaikan dalam pembangunan, dengan eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah terhadap ekosistem. Calon kepala daerah harus menjawab bagaimana mereka akan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan hidup. Ini juga terkait dengan masalah deforestasi, kerusakan hutan, dan dampak dari proyek-proyek besar yang merusak alam di Tanah Papua.

- **Desentralisasi Fiskal**

Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi fiskal menjadi kunci penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Papua, sebagai daerah yang mendapat dana otonomi khusus (OTSUS), memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam penggunaan dana tersebut. Masyarakat akan menilai sejauh mana calon kepala daerah mampu mengelola anggaran untuk meningkatkan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tanpa terjebak dalam praktik korupsi yang bekepanjangan.

- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM Papua tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor yang perlu perhatian serius. Pemilih akan mempertanyakan komitmen calon dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur pendidikan dan fasilitas kesehatan yang lebih merata akan menjadi fokus utama yang seharusnya didiskusikan secara mendalam oleh peserta pemilu dalam pemilihan kepala daerah serentak di Tanah Papua.

- **Korupsi Ekonomi Politik**

Korupsi ekonomi politik masih menjadi masalah besar di Papua, dengan banyaknya kasus penyelewengan dana publik dan proyek-proyek besar yang tidak berjalan dengan baik. Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat menghadirkan pemimpin yang tegas dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, ekonomi politik yang kerap terjadi di balik layar akan menjadi sorotan utama, karena seringkali melibatkan kepentingan elit yang menghambat pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Tanah Papua.

- **Hak Asasi Manusia**

Masalah HAM di Papua telah menjadi sorotan internasional, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat, kekerasan terhadap warga sipil, dan diskriminasi terhadap masyarakat adat. Pilkada 2024 juga akan menjadi momen bagi calon pemimpin untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menghormati hak asasi manusia, mengakhiri kekerasan, dan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Berangkat dari sejumlah indikator pemantaun isu publik tersebut, Lokataru Foundation berpandangan bahwa, Pilkada Papua 2024 bukan hanya soal memilih pemimpin serta arisan demokrasi, tetapi juga soal memilih siapa pejabat publik yang pantas untuk mengatasi masalah-masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat Papua dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, pemberantasan korupsi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, Lokataru Foundation mengadakan diskusi pemantaun dengan judul, **"MEMANTAU ISU PUBLIK DI PILKADA PAPUA 2024: Perspektif Desentralisasi Fiskal, Lingkungan, IPM, Korupsi Ekopol, & HAM"**.

WAKTU DAN TEMPAT

Acara ini akan dilaksanakan sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 November 2024
Pukul : 14.00 WIB-selesai
Tempat : Zoom Meeting (Terlampir)

Demikian *Term of References* ini kami susun agar dapat dijadikan bahan informasi bagi Bapak/Ibu Narasumber pada kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 November 2024



LOKATARU
FOUNDATION

Delpedro Marhaen Rismansyah
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation